

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya

1. Sejarah Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu kabupaten yang masuk bagian dari provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai unit pemerintah kecamatan yang terdiri dari beberapa desa. Kabupaten Tasikmalaya saat ini memiliki unit pemerintah sebanyak 39 kecamatan dan 351 desa. Saat ini pimpinan Bupati UU Ruzhanul Ulum, SE dan Wakil Bupati Ade Sugianto, S.IP yang telah memimpin selama 2 Periode dan sekarang Bupati UU Ruzhanul Ulum sedang mencalonkan diri untuk ikut pilkada Jawa Barat dengan maju sebagai calon wakil gubernur.

Sejarah Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa lepas dari bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya yang ada di Galunggung yang dimulai sejak abad ke VII sampai abad ke XII, raja baru akan dianggap syah bila mendapatkan persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung atau dengan istilah lain kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh). Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Galunggung adalah nama kerajaan pada masa itu yang didirikan pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111. Geger Hanjuang adalah Prasasti yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Batari Hyang adalah penguasa pertama di kerajaan ini dengan ajaran Sang Hyang Siksakanda ng Karesian. Ajaran Sang Hyang Siksakanda sangat populer, bahkan sampai masa Pajajaran ajaran Sang Hyang Siksakanda masih menjadi ajaran resmi.

Selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakarta dengan ibukotanya di daerah Dayeuh Tengah (sekarang Kecamatan Salopa), dimana daerah ini merupakan bawahan langsung dari kerajaan Pajajaran. Raja pertama adalah Sri Gading Anteg yang selama hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Penerus tahta yang tak lain adalah Dalem Sukakarta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535) Raja Pajajaran penerus Prabu Siliwangi.

Kerajaan Islam yang dipelopori oleh Demak dan Cirebon mulai mendesak kedudukan masa pemerintahan Prabu Surawisesa. Sejak tahun 1528 Sunan Gunung Jati mulai berkeliling ke seluruh wilayah tanah sunda untuk mengenalkan Agama Islam. Daerah-daerah yang terletak di bagian timur mulai berusaha untuk melepaskan diri di karenakan kekuasaan Pajajaran sudah mulai lemah.

Selanjutnya adalah era dimana periode pemerintahan di Sukapura yang mana selama 10 tahun telah terjadi pergolakan masa di wilayah Priangan. Adanya tiga kekuatan besar di pulau jawa pada awal abad XVII Masehi menjadi akibat terjadinya pergolakan ini yaitu, Mataram, Banten, dan VOC yang berpusat di

Batavia. Atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur, Sultan Agung memberikan hadiah kepada Wirawangsa sebagai penguasa Sukakarta yang kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura dengan Gelar Wiradadaha I. Kemudian Leuwiloa Sukaraja menjadi ibukota negeri yang sebelumnya di Dayeuh Tengah dan “negara” disebut “Sukapura”.

Selanjutnya, posisi ibukota banyak mengalami perpindahan pada periode pemerintahan R.T Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya, kemudian pada tahun 1832 pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya. Alasan perpindahan ibukota ini sebagai inisiasi Belanda untuk memperkuat benteng-benteng dalam menghadapi Diponegoro. Adanya kepentingan ekonomis bagi Belanda maka pada tanggal 1 Oktober Ibukota Sukapura kembali dipindahkan ke Tasikmalaya. Karena pada saat itu Galunggung yang subur menjadi penghasil nila dan kopi. Pada saat itu ibukota menjadi pusat pengumpulan rempah-rempah sebelum di ekspor. Karena posisi Manonjaya yang kurang strategis untuk dijadikan tempat sebagai pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.

Pada tanggal 21 Agustus 1111 masehi merupakan sejarah karena nama Kabupaten Sukapura berganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupatinya R.A.A Wiratuningrat (1908-1937) dan berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai upacara pentasbihan atau pebobatan batari Hyang sebagai penguasa di Galunggung tanggal 21 Agustus menjadi hari lahir Kabupaten Tasikmlaya.

2. Letak Geografis Kabupaten Tasikmalaya

Secara geografis kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya terletak antara 7°02'29" - 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur. Kemudian secara administratif wilayah batas Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa berdasarkan administratif. Wilayah pesisir dan lautan berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cikalong, Karangnunggal, dan Cipatujah, dengan garis pantai sepanjang 56 km. Ketinggian wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkisar 0 - 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Menurut ketinggiannya secara umum wilayah tersebut dibedakan, yaitu : datara tinggi berada di wilayah bagian utara dan dataran rendah berada di bagian selatan dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

Keadaan kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu : sebesar 1.39% sangat curam (>40%) dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15%-40%) sebesar 25,35 %, Curam (5%-15%) sebesar 27,11 %, Landai (2%-5%) sebesar 13,27 %, dan Datar (0%-2%) sebesar 32,87 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Menurut data kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya terlihat bahwa sebagian besar bentang alam didominasi oleh bentuk permukaan datar sampai agak curam,

sehingga untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah menjadi kurang menguntungkan dengan kondisi lahan tersebut.

Keadaan Kabupaten Tasikmalaya secara hidrologi terdiri dari Daerah Aliran sungai besar dan sungai kecil kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya, ada 6 daerah aliran sungai besar yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Sungai Ciwulan, Citanduy, Cipatujah, Cisanggung, Cimedang, dan Sungai Cilangla. Karena dipengaruhi dominasi vulkanik pola aliran daerah sungai umumnya berpola radial. Sedangkan pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular) pada daerah tektonik, hal ini bergantung pada arah proses dan bentuk tektonik yang terjadi.

3. Demografi

Berdasarkan sensus pendudukan tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.675.544 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 637 jiwa/Km². Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2010 sebanyak 835.052 sedangkan perempuan berjumlah 840.492 jiwa. Terdapat perbedaan jumlah penduduk antara tahun 2010 dan 2009 hal ini disebabkan karena jumlah penduduk tahun 2009 bersumber dari proyeksi hasil sensus penduduk tahun 2000. Dalam rentang tahun 2006 sampai 2010 menurut kelompok umur masih membentuk piramida usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan struktur lapangan pekerjaan masih didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Berdasarkan angka Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat dari tahun 2006 sampai 2010.

Selanjutnya, faktor makro lain yang merupakan kesuksesan pembangunan daerah diantaranya, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, pengangguran terbuka, dan PDRB perkapita, yang mana angkanya dari tahun 2006 sampai 2010 terus semakin membaik. Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya merilis data bahwa terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Dari berbagai sektor terdapat tiga sektor terbesar pekerjaan yaitu : Petani berjumlah 318.866 orang atau 34,81%, buruh tani berjumlah 275.559 orang atau 30,08%, dan buruh swasta berjumlah 97.712 orang atau 10,67%. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 376.045 jiwa (21,75%), kemungkinan sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani. Hal ini disebabkan karena buruh tani sangat rentan akan gejolak ekonomi yang sering mengakibatkan mereka sulit untuk mendapatkan pangan, layanan pendidikan, dan kesehatan.

Menurut BPS data kategori keluarga miskin sangat cocok dengan keadaan buruh tani di lapangan. Aspek yang terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui kesejahteraan hidup, tingkat kesehatan dan pendidikan adalah pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tumpuan serta penerus cita-cita bangsa. Pada tahun 2009 jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 549.789 jiwa atau 31,83% dari jumlah penduduk. Berbagai wadah diperlukan untuk mengekspresikan bakat dan kreatifitas pemuda yang tidak lain untuk mewadahi aktifitas dan kreatifitas generasi muda agar lebih berkualitas dan mandiri.

5. Ekonomi

Pada rentang waktu tahun 2006-2009 kondisi perekonomian makro Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami pertumbuhan, hal ini berdasarkan dengan kenaikan LPE sebesar 4,01% pada tahun 2006 menjadi 4,13% pada tahun 2009. Menurut Bank Indonesia (2007), faktor penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, konsumsi, meningkatnya kegiatan investasi, dan perdagangan luar negeri yang semakin meningkat pula.

Selanjutnya, terkendalinya laju inflasi dapat mendukung meningkatnya LPE. Pada tahun 2009 tercatat inflasi sebesar 4,17%, turun dari 12,07% di tahun 2008. Angka inflasi ini adalah inflasi Kota Tasikmalaya yang menjadi dasar dari inflasi di daerah Priangan Timur. Kenaikan harga sektor pangan pada tahun 2008 menjadi penyebab inflasi tinggi.

Sektor penyedia lapangan kerja terbesar di Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor pertanian, yaitu sekitar 43,22% peluang kerja berasal dari sektor pertanian, kemudian perdagangan 24,75%, dan jasa-jasa 11,08%. Penyedia utama kebutuhan masyarakat merupakan sektor pertanian hal ini didasari karena merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Selain itu karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus meningkat sektor pertanian menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur.

Sehingga, untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling efektif yaitu lewat peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Kabupaten Tasikmalay

memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian yang sudah mengarah pada ekspor diantaranya: Padi Organik (SRI) dengan sentra di 7 kecamatan (Salawu, Sukahening, Cineam, Manonjaya, Sukaraja, Cisayong, dan Sukaresik). Puspahiang dengan sentra manggis, Manonjaya dengan Mendong dan Golok Gonggong. Rajapolah dengan sektor industri kerajinannya, dan Sukaraja dengan sentra bordirnya.

B. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya

1. Sejarah Kota Tasikmalaya

Sebagai daerah otonomi baru sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya tidak bisa lepas dari berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Pada masa pemerintahan A.Bunyamin tahun 1976 sebagai Bupati Tasikmalaya kota ini merupakan ibukota dari Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian naik statusnya menjadi kota administratif, lalu pada masa pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh H. Suljana W.H maka pemerintahan kota menjadi kota yang mandiri.

Julukan Kota Tasikmalaya yang melekat sampai sekarang yaitu Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya berada pada pada $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$ BT dan $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$ LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Seiring perkembangan kota ini yang dulu masuk kedalam kabupaten sekarang terbentuk 2 buah bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

Lahirnya Kota Tasikmalaya ketika Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh A. Bunyamin, melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1976 disahkanlah Kota

Administratif Tasikmalaya oleh H. Amir Machmun yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kemudian, Drs.H. Oman Rosman menjabat sebagai Walikota administratif pertama, yang dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Barat, H. Aang Kunaefi. Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya pada awal berdirinya terdiri dari 3 Kecamatan yaitu, Tawang, Cihideung, dan Cipedes dengan total desa berjumlah 13.

Kemudian, melalui Bupati Tasikmalaya pada saat itu, Kol. Inf. H. Suljana W.H (1996-2001) di tahun 2001, mulai dibentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata S.H. setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 17 Oktober 2001 dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2001, pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru oleh Menteri Dalam Negero atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Bau-bau, Sikawang, batu, Cimahi, Tanjung Pinang, Pager Alam, Lubuk Linggau, Prabumulih, Padangsdempuan, Langsa, dan Lhoksumawe. Selanjutnya, Drs. H. Wahyu Suradiharja dilantik sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Bandung.

2. Pemerintahan

Melalui Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1976 Kota Tasikmalaya resmi sebagai Kota Administratif Tasikmalaya, dengan Drs. H. Oman Roosman sebagai walikota pertama yang dilantik oleh Gubernur Jawa Bara H.Aang Kunaefi. Wilayah

Kota Administratif Tasikmalaya pada awal berdirinya terdiri dari 3 Kecamatan yaitu, Tawang, Cihideung, dan Cipedes dengan total desa berjumlah 13.

Kemudian, melalui Bupati Tasikmalaya pada saat itu, Kol. Inf. H. Suljana W.H (1996-2001) di tahun 2001, mulai dibentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata S.H. setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 17 Oktober 2001 dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2001, pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru oleh Menteri Dalam Negero atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Bau-bau, Sikawang, batu, Cimahi, Tanjung Pinang, Pager Alam, Lubuk Linggau, Prabumulih, Padangsdempuan, Langsa, dan Lhoksumawe. Selanjutnya, Drs. H. Wahyu Suradiharja dilantik sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Bandung.

Pada tanggal 13 Desember 2001 melalui Surat Keputusan nomor 133 tahun 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171/Kep.380/Dekon/2002, pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya telah resmi disahkan. Keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan pada tanggal 26 April 2002 dan 30 April 2002. Sesuai hasil dari proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif pada tanggal 14 November 2002, Drs H. Bubun Bunyamin resmi dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya.

Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain :

- Kecamatan Tawang;
- Kecamatan Cihideung;
- Kecamatan Cipedes;
- Kecamatan Indihiang;
- Kecamatan Kawalu;
- Kecamatan Cibeureum;
- Kecamatan Mangkubumi;
- Kecamatan Tamansari.

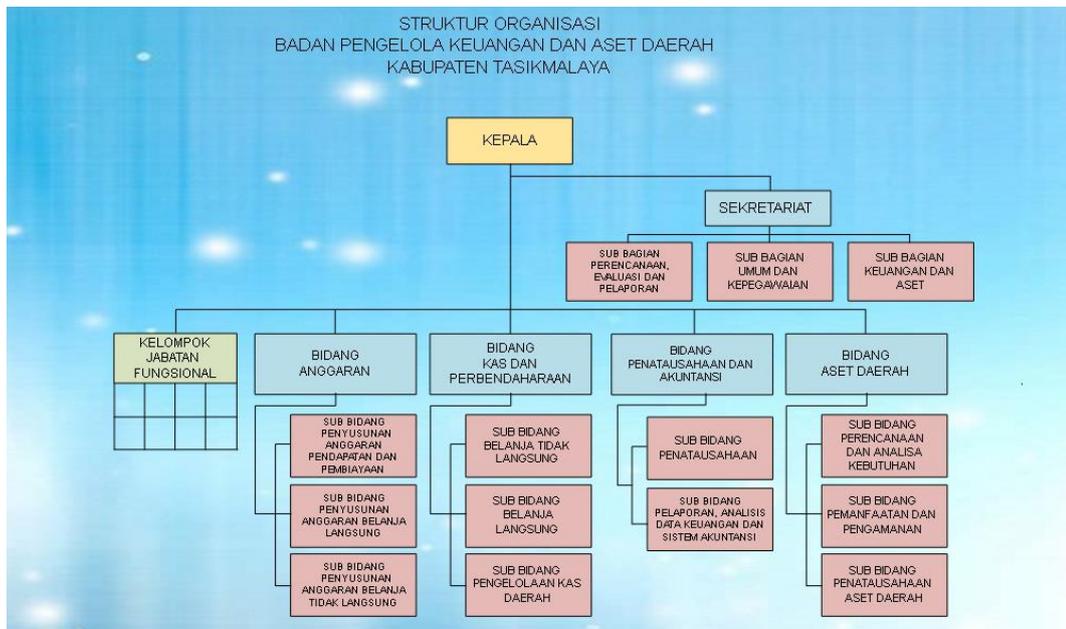
Kota Tasikmalaya sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 wilayahnya terdiri dari 8 Kecamatan dengan total kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54, selanjutnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa-desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, sehingga total keseluruhan kelurahan menjadi 69 kelurahan, kemudian untuk wilayah kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya kembali dimekarkan lagi sehingga menjadi sepuluh kecamatan.

Dibawah ini merupakan pemegang jabatan Walikota Administratif dari mulai terbentuknya Kota Administratif sampai terbentuknya pemerintah Kota Tasikmalaya:

1. Oman Roesman (1976-1985)
2. Yeng Ds. Partawinata (1985-1989)
3. R. Y. Wahyu (1989-1992)
4. Erdhi Hardhiana (1992-1999)
5. Bubun Bunyamin (1999-2007)
6. Syarif Hidayat (2007-2012)
7. Drs. H. Budi Budiman (2012-2017)

C. Gambaran Umum Bagian Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tasikmalaya

1. Struktur Organisasi



D. Gambaran Umum Bagian Aset Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya

1. Sejarah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan tipe A yang melaksanakan tugas pengelola keuangan dan aset daerah.

2. Visi dan Misi

- Misi

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL DALAM Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

- Visi

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
2. Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Akuntabel

3. Struktur Organisasi

